

ANALISIS TENTANG HUKUM DAN KETIDAKPTUHAN WARGA NEGARA TERHADAP RESOLUSI PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2021 KETIKA PANDEMIA CORONA VIRUS 19.

Oleh : Calisto Gonzaga
Mahasiswa di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Hukum
Universidade da Paz (UNPAZ)
Email: amorinho212@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang hukum dan ketidakpatuhan warga negara terhadap Resolusi Pemerintah nomor 74 tahun 2021 paska wabah penyakit Corona Virus berkembang dan terinfeksi di Timor-Leste.

Persoalann ekonomi dalam keluarga menjadi akar permasalahan tindakan warga negara untuk tidak mentaati dan akhirnya melanggar terhadap resolusi pemerintah nomor 74/2021, nmenyangkut beberapa larangan dan kewajiban tetapi tidak ada keseimbangan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika penetapan resolusi ini di undangkan. Sebab masyarakat yang ekonominya lemah dan kehidupan keluarga tergantung pada aktivitas pasar-pasar tradisional.

Pemerintah juga menutup semua akses hubungan luar negeri dan dalam negeri melalui jalur Internasional Perhubungan Udara, Laut dan Darat sehingga mengakibatkan juga lumpuhnya perekonomian secara mikro dan makro dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

Demikian juga terjadi dampak phisikologi atas dampak nilai Ekonomi, Sosial, Politik, dari konsekuensi negara dinyatakan dalam keadaan Darurat.

Studi “Norma Normatif” yang digunakan ini berdasarkan pendekatan “Peraturan Perundang-undangan” yang berlaku, pendekatan pada kasus yang terjadi serta pendekatan konseptual. Kemudian sebagai metode bahan analisis adalah metode “Perbandingan”.

Hasil temuan dalam penelitian adalah adanya pertentangan hukum, fenomena sosial lainya adalah dampak Politik, Sosiologi, dan Phisikologi.

Untuk menidaklajuti terhadap beberapa temuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pertentangan hukum, Constituição da Republica (CR), Deklarasasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), dengan Resolusi Pemerintah nomor 74 tahun 2021 melalui kajian asas *Rechtmatigheid*, *Doelmatigheid* dan *Wetmatigheid*.

Kemudian persoalan Politik, Ekonomi, Sosiologi, Phisikologi dan Hukum adalah peyebab utama kejahatan dan pelanggaran, diharapkan hasil tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan mencari solusi dari akar masalah tentang pelanggaran dan atau kejahatan dimasyarakat.

Kata Kunci : Pertentangan, Hukum, Resolusi.

1. Latar belakang.

Kajian studi Sosiologi dibidang Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan Politik dalam kehidupan sehari-hari menjadi persolan utama bagi warga negara sebagai respon untuk tidak mentaati terhadap Resolusi Pemerintah nomor 74 tahun 2021 ketika pandemi Covid 19 berkembang dan tereinfeksi di Timor-Leste pada tahun 2020-2022.

Sementara warga negara kehilangan pekerjaan pemutusan hubungan kerja (PHK), ketakutan akan bahaya virus Sars Acute Respiratory Sindrom (SARS) terhadap kesehatan bahkan mengancam jiwa menjadi studi phisikolgi yang sangat serius dari prespektif analisis phisikiater.

Demikian juga karena pemerintah membatasi dan melarang Hak Asasi dan kebebasan setiap orang sebagai warga negara dalam studi hukum. Hukum merupakan kekuatan yang tertinggi diatas kebijakan politik dalam penyelenggara pemerintahan. Oleh karena pemerintah dan negara harus menjamin supremasi hukum.

Dinamika politik global dan regional yang terjadi ditengah pandemi harus diwaspadai oleh negara-negara dan hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang ditandai dengan peraturan pemerintah atau resolusi pemerintah, sehingga peraturan ini menjadi proteksi terhadap warga negara. Supremasi hukum harus ditegakan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi sesuai dengan keinginan rakyat atas kekuatan hukum sesuai dengan martabat manusia.

Transformasi sosial budaya masyarakat pasca penerapan resolusi

pemerintah nomor 74/2021, adalah penerapan kebijakan baru di masyarakat yang menyebabkan terjadinya transformasi sosial budaya terutama pada interaksi sosial budaya di masyarakat. Secara sosiologis telah mengakibatkan perubahan sosial yang tidak direncanakan, suatu perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak diinginkan kehadirannya oleh masyarakat. Bahkan, pada keadaan tertentu dapat memicu masalah kehidupan dan terjadinya kekacauan.

Dampak Phisikologi meningkatkan kecemasan yang dihadapi banyak orang. Para ahli memperingatkan bahwa sebagian orang bisa mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan, lebih lama dari pernyataan presiden menyatakan negara dalam keadaan darurat atau emergensi. Kecemasan umum juga merupakan masalah kesehatan mental yang sangat penting untuk diperhatikan. Ada banyak orang yang sudah menderita kecemasan dalam masyarakat modern kita, tetapi orang yang lebih mudah cemas bisa terus merasakannya dan kondisinya bisa memburuk, bahkan jika dihentikan resolusi pemerintah ini, akan tetapi beberapa orang mungkin tetap cemas, karena masih ada risiko untuk menghadapi masalah ekonomi, pekerjaan dan kesehatan fisik yang serius.

Ekonomi keluarga dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan dari anggota keluarga itu sendiri serta masyarakat dilingkungan sekitarnya. Masalah yang berhubungan dengan ekonomi keluarga yang tidak kalah penting adalah masalah kesejahteraan keluarga. Apakah yang disebut dengan keluarga sejahtera atau bahagia

adalah ukuran kebahagiaan seseorang tidaklah sama relatif meskipun demikian dapatlah ditinjau dari kebutuhan pokok manusia yang mendatangkan kebahagiaan atau kesejahteraan tersebut.

Sifat hukum yang memaksa, dan mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup dimasyarakat kemudian dituntut untuk mentaati terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, maka pemerintah harus menjamin kepastian norma atau kaidah hukum ini menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat sehingga kalau melanggar maka akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi dari kaidah atau norma tersebut. Kepastian tersebut ini dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya suatu ketetapan peraturan-pemerintah atau resolusi pemerintah.

2) Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh informasi agar menggambarkan permasalahan yang ada serta menganalisa hukum terutama Resolusi Pemerintah nomor 74 tahun 2021 tentang melarang warga negara keluar rumah dan mewajibkan tinggal ditempat, wajib karantina, wajib divaksin, Swab, serta wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang menggunakan Masker, menjaga jarak, menghindari pertemuan dalam bentuk apapun sampai aktivitas sehari-hari termasuk pekerjaan pun di tutup.

3) Metode penelitian .

Studi Norma Normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yaitu konstitusi, Deklarasi hak Asasi Manusia, dan resolusi pemerintah nomor 74 tahun 2021, pendekatan pada studi kasus yang berdasarkan pada data statistik dari Sistim Menejemen Insiden (SMI) dari kepolisian Nasional Timor-Leste (KNTL), yang terjadi adalah 356 kasus yang melibatkan 776 tersangka pelanggaran ketidakpatuhan terhadap penetapan Resolusi Pemerintah tersebut pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2020. Secara konseptual dari prinsip-prinsip konstitusi dan Deklarasi Hak Asasi Manusia serta resolusi pemerintah. Kemudian sebagai teknik untuk melakukan analisis adalah metode komparatif atau perbandingan sebagai upaya pengelolaan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data yang tersebut menjadi mudah dimengerti dan berguna untuk merespon permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

4) Hasil yang di temukan.

Hasil penelitian ini dapat sampaikan terdapat pertentangan hukum dari Constitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan Resolusi Pemerintah nomor 74 tahun 2021 tentang beberapa larangan dan kewajiban, melarang warga negara keluar rumah , tempat tinggal, dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pendidikan, politik, serta Kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga akhirnya menjadi beban phisikologi dalam kehidupan sehari-hari yang berakibat terhadap kesehatan.

Penemuan lainya tentang faktor penyebab warga negara terhadap peraturan pemerintah yaitu karena

persoalan politik. Persoalan Politik, dalam dinamika sosial politik Gabinet pemersatu ke VIII menghadapi krisis kepemimpinan, karena sembilan orang calon menteri tidak dilantik, Rancangan Anggaran Pendapatan Negara kandas, kekosongan kas negara untuk membiayai pembangunan nasional, terjadi kekuasaan sewenang-wenang tidak adanya Equality before the Law, tidak ada kesamaan derajat antara masyarakat dan elit politik dimata hukum. Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan global dan hubungan internasional antar negara-negara di Dunia. Sejak kemunculannya pada Desember 2019, Virus ini langsung menjadi perhatian dunia. Sebab intensitas penyebarannya sangat cepat dan mengakibatkan tingginya kematian di seluruh dunia, banyak negara yang harus menutup wilayahnya.

Persoalan Sosiologi, Transformasi sosial budaya masyarakat pasca penerapan Resolusi Pemerintah nomor 74/2021, adalah penerapan kebijakan new normal di masyarakat yang menyebabkan terjadinya transformasi sosial budaya terutama pada interaksi sosial budaya di masyarakat. Transformasi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai dampak adanya penerapan kebijakan normal baru, hal peraturan pemerintah dan beberapa kali menetapkan resolusi pemerintah tentang larangan dan kewajiban bagi warga negara, pasca pandemi Covid 19. Penerapan pembatasan kegiatan sosial dan pemberlakuan tatanan baru atau new normal pasca pandemi Covid 19, berdampak pada berubahnya aturan dalam berinteraksi di masyarakat. Di Timor Leste, pandemi Covid-19 telah berlangsung sejak awal

tahun 2020, dan hingga saat ini penyebaran virus corona masih terus mewabah. Pemerintah telah berusaha melakukan segala upaya dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru atau New Normal.

Kebijakan tersebut mengharuskan masyarakat untuk menyesuaikan perilaku berdasarkan pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara sosiologis telah mengakibatkan perubahan sosial yang tidak direncanakan, suatu perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak diinginkan kehadirannya oleh masyarakat. Bahkan, pada keadaan tertentu dapat memicu masalah kehidupan dan terjadinya kekacauan. Sebagian tatanan nilai dan norma lama harus ditata ulang atau di reproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Salah satu tata aturan yang baru tersebut ditandai dengan adanya himbuan dari pemerintah untuk belajar secara online melalui cara bekerja, beribadah di rumah, online ilegal, sejak awal kemunculan virus di Timor-Leste. Begitu juga dengan pola kebiasaan masyarakat yang guyub, senang berkumpul dan berinteraksi secara intim, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Kebijakan physical/social distancing telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya.

Persoalan Psikologi, Dampak Psikologi meningkatkan kecemasan banyak orang. Para ahli memperingatkan bahwa sebagian kecil orang bisa mengalami masalah

kesehatan mental yang berkepanjangan, lebih lama dari pernyataan presiden menyatakan negara dalam keadaan darurat atau emergensi. Dari makan di restoran bersama pasangan dan kerabatnya hingga menghadiri klub bersama dengan teman-teman, kehidupan sosial seperti ini sebelum negara dalam keadaan darurat cukup aktif. Namun sejak awal bulan Januari hingga Maret 2020, semua masyarakat merasakan kecemasan sosial dan perilaku obsesif terkait dengan pengurungan di karantina, Klinik dan dirumahkan.

Kekecewaan soal mengalami kemunduran dan ketakutan kalau nantinya butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali ke jalur yang benar dalam hal mengelola, bersalah karena terjerumus dalam kejahatan walaupun ada kausalitas yang menyebabkan. Banyak orang menjadi sedikit lebih cemas selama pemerintah memperlakukan peraturan pemerintah dan membatasi ruang gerak dari suatu kebebasan, dan hak asasi namun pengalaman hidup banyak orang menunjukkan bahwa untuk setiap orang, dapat memicu atau memperburuk masalah kesehatan mental yang jauh lebih serius. Menurut seorang Psikolog khawatir sekali kemungkinan penerapan resolusi pemerintah ini bertahan dalam jangka panjang. Lima sampai 10 tahun mendatang, kalau demikian apa yang akan terjadi terhadap psikologi masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi komunitas yang ekonominya lemah, mencari nasi sepiring tergantung pada pasar. Steven Taylor, penulis *The Psychology of Pandemics*, dan Psikiatri di University of British Columbia, berpendapat bahwa untuk 10 hingga 15% minoritas

yang malang, hidup tidak akan kembali normal karena dampak psikologi pada kesejahteraan mental mereka. Australia's Black Dog Institute, sebuah organisasi penelitian kesehatan mental independen terkemuka, juga menyuarakan keprihatinan tentang banyaknya minoritas yang akan terpengaruh oleh kecemasan jangka panjang atas beberapa peraturan pemerintah tentang larangan bagi warga negara sebagai subyek hukum. Di Inggris, kelompok spesialis kesehatan masyarakat memperingatkan dalam *British Medical Journal* bahwa dampak dari pada beberapa peraturan pemerintah tentang melarang aktivitas sehari-hari dan menutup semua perusahaan akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kemungkinan akan bertahan lebih lama daripada dampak kesehatan fisik walaupun pemerintah telah mempertimbangkan keadaan kesehatan umum jauh lebih penting dari pada aspek kemewahan dan kemajuan suatu perusahaan.

Berdasarkan fenomena sosial tersebut diatas maka ketahu dari sudut pandang asas "*Rechtmatigheid*" terhadap hukum dan ketidapatukan adalah jelas memiliki dasar yang kuat karena mulai dari *Constituição da República (CR)* sebagai sumber segara sumber hukum telah menjelaskan secara substansial tentang negara berdiri diatas hukum, dan negara menjamin hak atas kebebasan dan keamanan serta integritas individu sebagai warga negara. Sementara dari sudut pandang Deklarasi Universal hak Asasi Manusia (HAM) juga menjelaskan secara jelas tentang Hak Atas kebebasan dan hal urusan pribadi seseorang sehingga tidak diragukan prinsip hukum ini. Akan tetapi

penetapan Resolusi Pemerintah nomor 74 tahun 2021 yang memiliki mutan materinya adalah bertentangan dengan *Constituição da República (CR)* dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) karena melarang warga negara Tinggal dirumah dan atau tempat tinggal, tidak boleh melakukan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mewajibkan warga negara untuk divaksin, wajib Quarentina, wajib rawat inap di Puskesmas Vera Cruz (*Izolamento*), wajib Swab dijalan-jalan, di pos-pos pemeriksaan petugas kepolisian.

Sementara di lihat dari sudut pandang asas hukum "Doelmatigheid", bahwa Resolusi Pemerintah nomor 74 tahun 2021 ini, tidak efektif dan efisien karena kebijakan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat dan tujuannya tidak jelas arahnya. Justru penetapan resolusi pemerintah tersebut dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian secara mikro bagi keluarga yang ekonominya lemah sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Mengakibatkan kehilangan pekerjaan (PHK) mengakibatkan banyak perusahaan yang jatuh bangkrut. Membuat mal nutrisi bagi anak-anak meningkat, mengalami post trauma secara psikologi hingga kematian. Analisis perbandingan data antara tahun 2019 dengan 2021 berbeda yaitu pada tahun sebelumnya dengan modus operandi kegiatan ilegal perdagangan karena untuk benefit atau margin sedangkan pada tahun 2021 adalah efek dari resolusi pemerintah tentang beberapa larangan yang mengakibatkan persoalan Ekonomi,

dan sosiologi serta psikologi bagi warga negara.

Demikian juga dari sudut pandang "Wetmatigheid" terhadap hukum dan Resolusi Pemerintah adalah, tidak ada asas keadilan di pengadilan melalui putusan pengadilan. Putusan pada beberapa kasus desobediensia di pengadilan Municipio de dili adalah dengan "Pena Multa " atau bayar denda kepada Pemerintah. Berdasarkan dengan teori kausalitas maka teori situasi darurat maka para terpidana seharusnya di bebaskan dari tindakan hukum dan pelanggaran atau biaya yang dibebankan harus dibayar oleh Kementrian Sosial atas nama pemerintah.

5) Kesimpulan dan Saran.

Menindaklanjuti terhadap beberapa temuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pertentangan hukum, *Constituição da Republica (CR)*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), dengan Resolusi Pemerintah nomor 74 tahun 2021 melalui kajian asas *Rechtmatigheid*, *Doelmatigheid* dan *Wetmatigheid*. ketika pandemi Corona Virus 19 terinfeksi di Timor-Leste (TL). Kemudian persoalan Politik, Ekonomi, Sosiologi, Psikologi dan Hukum adalah penyebab terjadinya kejahatan dan pelanggaran juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis, faktor-faktor penyebab serta dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan mencari solusi dari akar masalah tentang pelanggaran dan atau kejahatan dimasyarakat.